

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi dan teknologi informasi di masa kini memiliki pengaruh atau efek yang besar bagi kehidupan manusia terutama untuk organisasi milik negara. Peranan dan teknologi informasi ini dapat membantu sebuah organisasi dalam mencapai visi dan misinya. Dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi tersebut, dapat memungkinkan perusahaan untuk menyajikan, mengawasi serta dapat melaporkan keuangan dengan tepat dan tanpa masalah. Suatu Teknologi yang di gunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang di gunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. (Indriantoro 2000 : 102).

Secara umum, teknologi informasi juga merupakan komponen yang penting dalam menyelesaikan suatu masalah dalam sebuah organisasi. Semakin meningkatnya teknologi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tentunya juga harus di dukung dengan adanya sumber daya manusia atau karyawan yang berkualitas untuk mendukung tercapainya tujuan utama suatu organisasi.

Menurut Hasibuan (2007) Karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan menjual tenaganya (fisik dan pikiran) kepada suatu organisasi dan memperoleh balas jasa yang sesuai dengan perjanjian. Balas jasa yang di peroleh karyawan yaitu Gaji. Menurut Handoko (dalam Sitanggang, 2021 : 5)) Gaji merupakan imbalan dalam bentuk uang kepada karyawan sebagai balas jasa atas pengorbanan yang di berikan guna menjadi penyemangat bagi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi yang di lakukan bersama.

Selain itu di dalam suatu Organisasi, akuntansi memegang peranan yang sangat penting, karena fungsi akuntansi dapat memberikan informasi mengenai keuangan dari suatu organisasi. Pengelolaan organisasi dilakukan oleh manajemen dengan mengolah informasi-informasi yang diperoleh dan dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk pengambilan suatu keputusan. Pengambilan keputusan yang baik adalah pengambilan keputusan yang di dasarkan oleh informasi yang akurat dan tepat, untuk memenuhi hal tersebut di perlukan sistem informasi akuntansi. Suatu organisasi milik negara memanfaatkan sistem informasi akuntansi untuk menyajikan laporan-laporan keuangan dalam hal untuk memenuhi kepentingan informasi untuk para kreditor ,investor ,dan lain-lain. Sistem informasi akuntansi mengandung sebuah siklus dalam melaporkan keuangan organisasi secara tepat dan efektif. siklus tersebut berkaitan dengan teknologi informasi demi kemajuan suatu organisasi. Sistem informasi dapat mempermudah suatu organisasi melakukan sebagian besar aktivitas organisasi. Dengan memberikan informasi yang tepat dan benar, biaya produktivitas dapat di minimalisir sehingga efektif dan efisien.

Menurut Mulyadi (2016 :3) Sistem Akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan dan laporan yang di koordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan. Menurut Yenni Vera Fibriyanti (2017 : 2) bahwa “Sistem Akuntansi dalam suatu organisasi dapat membantu pihak manajemen memperoleh informasi yang tepat dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan utama suatu organisasi termasuk dalam hal pemberian gaji dan upah secara tepat. Penerapan sistem akuntansi penggajian bertujuan menjaga keamanan, memeriksa ketelitian data akuntansi, menjamin adanya efisiensi dalam operasional serta menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dari kebijakan yang telah di tetapkan. Di dalam suatu organisasi Sistem Penggajian merupakan Faktor yang penting dalam mencapai tujuan suatu organisasi dimana sistem penggajian terdiri dari suatu kerangka kerja yang saling berhubungan dalam suatu organisasi yang berfungsi menginformasikan data biaya tenaga kerja yang di butuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan pada organisasi dan mengatur proses pembayaran atas jasa yang di lakukan oleh karyawan / pegawai.

Menurut Baridwan (2013 : 223), Sistem informasi akuntansi (SIA) penggajian merupakan fungsi, organisasi, formulir, catatan, dan laporan tentang penggajian yang dibentuk dan diolah untuk menyediakan informasi keuangan guna memudahkan pengelolaan organisasi. Sistem informasi akuntansi penggajian adalah fungsi, dokumen, catatan, dan sistem pengendalian intern yang berguna untuk perhitungan harga pokok produk serta pengawasan biaya tenaga kerja didapat dari segenap informasi penggajian tersebut (Mulyadi, 2016 : 373).

Perlunya menerapkan sistem informasi akuntansi terkait penggajian dan pengupahan memiliki tujuan agar suatu organisasi dapat menghindari terjadinya kesalahan, penyimpangan, atau pengeluaran secara fiktif sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi. Sistem Informasi Akuntansi atas penggajian dan pengupahan dapat mengatur proses penerimaan atau pembagian gaji pada karyawan yang bekerja di suatu organisasi sehingga dapat memberikan efisiensi dan efektivitas dalam proses penggajian (Purba, 2018).

Proses perhitungan gaji dan upah pegawai sampai dengan pembayarannya dilandasi oleh perancangan sistem suatu organisasi. Dalam membuat rancangan sistem penggajian dan pengupahan ini haruslah menjamin validitas, otoritas kelengkapan, klasifikasi penilaian, ketepatan waktu dan posting serta ikhtisar dari transaksi penggajian dan pengupahan (Mulyadi, 2003 : 17). Sistem informasi penggajian di rancang untuk menangani transaksi penghitungan gaji dan upah karyawan atau pegawai dan pembayarannya. Sistem ini terdiri dari jaringan prosedur yaitu: prosedur pencatatan waktu hadir dan waktu kerja, prosedur pembuatan daftar gaji dan upah, prosedur pembayaran gaji dan upah, dan prosedur distribusi biaya gaji dan upah. Sistem akuntansi penggajian sangatlah berkaitan dengan pengendalian intern suatu organisasi. Keberadaan sistem akuntansi penggajian merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan pengendalian intern suatu organisasi. Apabila sistem akuntansi penggajian yang di miliki oleh organisasi dapat berjalan dengan baik, maka pengendalian intern organisasi dapat di laksanakan dengan baik pula.

Menurut Romney dan Steinbart (2013) Sistem pengendalian intern penggajian dan pengupahan merupakan pembayaran atas jasa yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai pada suatu organisasi. Pemberian terhadap karyawan atau pegawai seharusnya mendapat perhatian utama dari pimpinan karena pemberian gaji yang memadai akan membawa pengaruh positif terhadap semangat kerja para pegawai. Sistem pengendalian intern merupakan proses pemantauan yang memungkinkan manajemen mengetahui apakah tindakan yang dilakukan dan bagaimanakah tindakan koreksinya jika pelaksanaan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan semula. Suatu sistem pengendalian intern dikatakan memadai jika dengan diterapkannya sistem tersebut semua tujuan organisasi dapat tercapai. Tujuan tersebut adalah pengamanan atau menjaga aktiva yang dimiliki, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, menjamin adanya efisiensi dalam operasional serta menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dari kebijakan yang telah ditetapkan, dengan demikian dapat dilihat bahwa sistem pengendalian intern mempunyai peranan yang penting sekali bagi suatu organisasi.

Badan pusat statistik adalah lembaga pemerintah Nonkementrian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. UU Nomor 16 tahun 1997 dan peraturan pemerintah Nomor 51 tahun 1999, menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya. Secara kelembagaan, Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan pusat statistik Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal merupakan bagian integral dari Badan pusat statistik Republik Indonesia secara keseluruhan di tuangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007, Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah.

Badan Pusat Statistik Kota Kupang berdasarkan visi yang ditetapkan untuk tahun 2020-2024 yaitu Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju Dalam visi yang baru tersebut berarti BPS berperan dalam penyediaan data statistik Nasional maupun Internasional, untuk menghasilkan data statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan kebenaran sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju. Adapun Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota. Peraturan Badan Statistik ini mengatur tentang ketentuan umum, BPS Provinsi, BPS Kabupaten/Kota, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, lokasi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Badan Pusat Statistik Kota Kupang menyediakan data yang akurat dan berkualitas untuk berbagai keperluan seperti perencanaan pembangunan, penelitian, dan kegiatan ekonomi lainnya. Pelayanan yang berkualitas ini didukung oleh kinerja pegawai yang baik dan untuk melihat kinerja pegawai salah satunya di lihat dari jam hadir para pegawai dan cara pencatatan jam hadir pegawai di Badan Statistik Kota Kupang yaitu menggunakan aplikasi presensi BPS yang di instal pada handphone setiap pegawai. Absensi atau kartu jam hadir adalah dokumen yang mencatat jam hadir setiap pegawai. Pencatatan jam hadir yang di lakukan oleh setiap pegawai bisa mempengaruhi tunjangan kinerja yang akan diterima pegawai setiap bulannya. Karena apabila pegawai lupa atau tidak mencatatkan atau terlambat dalam jam kehadirannya maka akan mempengaruhi komponen-komponen yang ada pada gaji, terutama sekali pada pos tunjangan, karena tunjangan yang di berikan kepada setiap pegawai tergantung dari beberapa banyak pegawai hadir pada jam kerja.

Sistem penggajian pada Badan Pusat Statistik Kota Kupang sudah terkomputerisasi, pembayaran gaji di lakukan sebulan sekali yaitu dengan cara satuan kerja instansi pemerintah mengajukan permintaan kepada Kantor pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN), berdasarkan permintaan tersebut maka KPPN akan melakukan pencairan yang artinya sistem penggajian pada Badan Pusat Statistik Kota Kupang langsung dari pusat ke pegawai lewat rekening masing-masing pegawai. Pada Badan Pusat Statistik Kota Kupang setiap pegawai menerima gaji setiap bulannya dan gaji yang dibayarkan berdasarkan masa kerja, pangkat, dan jabatan adapun tunjangan kinerja yang diperoleh berdasarkan jabatan dan absen pegawai, selain itu terdapat pula tunjangan makan yang diperoleh setiap pegawai berdasarkan absen walaupun terlambat tetap di bayar namun apabila ada pegawai yang melakukan perjalanan dinas maka ia tidak memperoleh tunjangan makan tetapi ia memperoleh tunjangan perjalanan dinas.

Penggunaan sistem penggajian yang sudah terkomputerisasi bertujuan untuk menghindari timbulnya kecurangan maupun kesalahan dalam pencatatan, perhitungan dan pembayaran gaji. Meskipun sistem akuntansi penggajian pada BPS Kota Kupang sudah terkomputerisasi, masih tetap diperlukan analisis dan evaluasi dari segi penerapan sistem penggajiannya. Penerapan sistem akuntansi penggajian terkomputerisasi akan membantu meringankan tugas bagian keuangan BPS Kota Kupang. Dengan sistem akuntansi penggajain terkomputerisasi, semua hal yang berhubungan dengan penggajian dapat di tangani dengan menggunakan komputer seperti: presensi, rekap presensi, pembuatan laporan penggajian, dan pengelolaan data karyawan yang terdapat dalam sistem akuntansi penggajian di perusahaan terkait.

Afansyah, Praptiningsih, Setiawan (2021) Tentang Efektivitas Pengendalian internal sistem penggajian pada Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Hasil menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi penggajian di BPS Provinsi DKI Jakarta sudah efektif sesuai dengan UU/PMK/peraturan yang berlaku dan juga sesuai dengan teori yang ada. Indikator SIA Penggajian yang digunakan seperti fungsi SIA Penggajian, dokumen SIA penggajian, prosedur SIA penggajian, sudah sesuai dengan praktek dan teori

Aprilliadi, Teddy (2019) Tentang Analisis sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan dalam upaya pengendalian internal pada karyawan Outsourcing Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem dan prosedur penggajian dan pengupahan pada karyawan outsourcing (PT. Varia Usaha Bahari) di packing plant Ciwandan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Dalam memenuhi unsur-unsur dan tujuan pengendalian internal sistem penggajian masih kurang efektif. Hal ini ditandai dengan adanya perangkapan tugas, dari prosedur pembuatan daftar gaji dan upah juga melakukan pembayaran gaji dan upah, catatan akuntansi yang digunakan belum lengkap, karena tidak ada jurnal umum, kartu harga pokok produk dan kartu biaya, pemasukan absensi melalui mesin *fingerprint* tidak diawasi, daftar gaji dan upah serta potongan gaji tidak di otorisasi oleh bagian kepegawaian / personalia.

Langi, dkk (2019) Tentang Analisis sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan dalam upaya pengendalian internal pada PT. Gemilang Emas Indonesai. Hasilnya menunjukkan penggajian sistem informasi akuntansi dan pengupahan di PT. Gemilang Emas Indonesia belum mendukung upaya pengendalian internal. Masih kurangnya pemisahan tugas dalam organisasi struktur dan praktik perusahaan yang sehat. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang dilakukan adalah adanya karyawan yang ngerangkap tugas supaya dapat meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan dari karyawan baik dalam hal absensi maupun dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing bagian.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pentingnya sistem informasi akuntansi penggajian Pada Badan Pusat Statistik Kota Kupang. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan Dalam Upaya Mendukung Efektivitas Pengendalian Internal Pada Badan Pusat Statistik Kota Kupang.**

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah **Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan dalam upaya mendukung efektivitas pengendalian internal Pada Badan Pusat Statistik Kota Kupang.**

## **1.3 Persoalan Penelitian**

Berdasarkan uraian masalah penelitian maka persoalan penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan Pada Badan Pusat Statistik Kota Kupang?
2. Apakah Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan yang diterapkan dapat mendukung efektivitas pengendalian Intern pada Badan Pusat Statistik Kota Kupang?

## **1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah mengumpulkan data dari berbagai informasi yang terkait dengan Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan dalam Upaya pengendalian Internal, yang kemudian dianalisa untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan yang diterapkan pada Badan Pusat Statistik Kota Kupang
2. Untuk menganalisis dan mengetahui sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan yang diterapkan dapat mendukung efektivitas pengendalian intern pada Badan Pusat Statistik Kota Kupang.

#### **1.4.2 Manfaat penelitian**

Manfaat yang hendak di capai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

Penulisan proposal ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau bahan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya diwaktu yang akan datang khususnya yang akan meneliti tentang sistem informasi akuntansi bagi jurusan Akuntansi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Untuk memperdalam pengetahuan penulis terkait pengaruh sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan dalam upaya mendukung efektivitas pengendalian intern.

b. Bagi Instansi

Dapat memberikan masukan atau informasi bagi Kepala Badan Pusat Statistik Kota Kupang dalam menentukan kebijakan sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan dalam upaya mendukung efektivitas pengendalian internal